



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

PERJANJIAN KINERJA 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DANIEL JINGGA
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Papua Pegunungan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Wamena, 01 Oktober 2023

KETUA KPU
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

DANIEL JINGGA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
PEGUNUNGAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah rancangan Keputusan KPU Provinsi yang disusun sesuai SOP	95%
2	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	35%
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK" Nilai Akuntabilitas Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik	79 B WTP
4	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77,5% 77%
5	Terwujudnya koordinasi Penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	77% 0,17% 100%
6	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu / Pemilihan yang Aman dan Damai Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi	100% 89%

Program

Anggaran

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Rp 20.565.709.000,- |
| 2. Program Dukungan Manajemen | Rp 2.842.071.000,- |

Wamena, 01 Oktober 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**

DANIEL JINGGA



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

PERJANJIAN KINERJA 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AGUS FILMA

Jabatan : Plt. Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DANIEL JINGGA

Jabatan : Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan Selaku atasan langsung Pihak Pertama. Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**PIHAK KEDUA
KETUA KPU
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**

DANIEL JINGGA

**PIHAK PERTAMA
Plt. SEKRETARIS KPU
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**

AGUS FILMA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

SEKRETARIAT KPU PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya fasilitas lembaga riset kepilluan dan operasionalisasi nya	Jumlah fasilitas kerjasama KPU Provinsi dengan lembaga riset kepilluan	3 keg
2	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
4	Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Provinsi Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi	B WTP 79
5	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
6	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	10 Keg
7	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	5 kali
8	Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu Persentase target kinerja KPU Provinsi yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	75% 90%
9	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	100%
10	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	97,5% 90%

11	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara transparan dan akuntabel	Persentase Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	90%
12	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota, yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW sesuai peraturan perundang-undangan	100%
13	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	90%
14	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Kebijakan Bidang Kepegawaian	8 Rancangan
15	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku	Persentase Pengisian Formasi Jabatan Fungsional Tata Kelola Pemilu (JF PKP)	90%
16	Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhok	Persentase badan adhoc yang dibentuk dan di evaluasi	8 Kab
17	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Provinsi	90%
18	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Provinsi	2 Lap
19	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	95%
20	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%
21	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Keputusan KPU Provinsi tentang kearsipan yang telah disusun	1 Rancangan
		Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Provinsi	87,5%
22	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik	100%

	Tugas KPU Provinsi	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik	100%
23	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Notulensi / Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang	100%

24	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi	diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Provinsi Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi yang dapat ditanggulangi	100%
25	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30 %
26	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mengisi dan menyampaikan kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu Persentase capaian kelengkapan unsur kartu kendali KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Jumlah Satker KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki dokumen Penilaian Risiko (<i>Risk Assesment</i>) level entitas dan aktivitas Jumlah satker yang menyampaikan laporan semesteran dan tahunan SPIP tepat waktu Nilai maturitas SPIP KPU Provinsi berdasarkan Penilaian Mandiri (PM) oleh manajemen Satker dan/atau Penjaminan Kualitas (PK) dari APIP	100% 99,5% 9 Satker 9 Satker 4,1
27	Meningkatnya efektifitas sistem pengendalian internal	Prosentase rapat pembahasan kartu kendali SPIP yang dilaksanakan dalam 1 tahun Prosentase anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang patuh terhadap kode perilaku dan kode etik (tidak mendapatkan sanksi hasil pengawasan internal ataupun kode etik oleh DKPP)	90% 97,5%

28	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Provinsi	90%
29	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Provinsi	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Provinsi	70%
30	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Provinsi	Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	80%
31	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja di lingkungan KPU Provinsi	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	70%

32	Peningkatan kompetensi SDM KPU Provinsi	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%
33	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	1 Kajian 2 Dokumen
34	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya.	Persentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	95%
35	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan	Persentase Satker KPU Kabupaten/ Kota yang menyediakan logistik Pemilu/Pemilihan di TPS secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
36	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
37	Tersusunnya Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten / Kota sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memiliki SOP Penyusunan Keputusan Persentase KPU Kab/Kota yang minimal 80% Rancangan Keputusannya disusun tepat waktu dan sesuai dengan SOP	95% 90%
38	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki SOP Pengunggahan Produk Hukum ke JDIIH	100%

39	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase Keputusan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diupload ke JDIH yang memiliki abstrak dan diunggah tepat waktu sesuai SOP	95%
		Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang rata-rata konten berita hukum pada laman JDIH KPU Provinsi per bulan minimal 4 konten	100%
		Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki SOP Pengunggahan Informasi Produk Hukum ke Media Sosial JDIH	80%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memiliki nilai rata-rata postingan pada akun medsos JDIH per bulan minimal 5 postingan	80%
		Persentase Jumlah Satker KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tanpa sengketa hukum (nol perkara) baik di Bawaslu, PTUN, PN dan PT, KIP dan MK	90%

40	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi	89%
		Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Provinsi	100%
		Persentase KPU Provinsi yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%
41	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
42	Pengelolaan calon peserta Pemilu	Persentase calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	9 satker (Prov/ kab)
43	Terwujudnya rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu / Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu / Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	4 draft
44	Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan	Jumlah dokumen SOP, pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 dok

45	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan KPU Provinsi	40%
46	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi	
		Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu /Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Provinsi serta media massa.	100%
47	Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu /Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mengadakan logistik Pemilu / Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%
		Persentase KPU Kab/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu / Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%
		Persentase KPU Kab/Kota yang memelihara dan menginventarisir logistik Pemilu/Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melakukan penyusunan Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu	100%
48	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu	9 satker (Prov/ kab)
49	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Provinsi	80%

Program / Kegiatan Anggaran

1.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Rp.	24.867.000
2.	Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan	Rp.	44.016.000
3.	Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih	Rp.	30.000.000
4.	Advokasi dan Sengketa Hukum	Rp.	10,822,000
5.	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Rp.	3.148.637.000
6.	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	Rp.	65.792.000
7.	Pembentukan Badan Adhoc	Rp.	69.370.000
8.	Masa Kampanye Pemilu	Rp.	206.296.000
9.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Rp.	243.340.000
10.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp.	96.049.000
11.	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Rp.	628.602.000
12.	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Rp.	20.085.000
13.	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota	Rp.	556.820.000
14.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp.	2.291.569.000
15.	Manajemen Perencanaan dan Organisasi	Rp.	10,000,000
16.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Rp.	67.917.000
17.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp.	592.619.000
18.	Pemeriksaan Internal KPU	Rp.	14.793.000
19.	Data dan Informasi	Rp.	52.572.000

Wamena, 01 Oktober 2023

**PIHAK KEDUA
KETUA KPU
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**

**PIHAK PERTAMA
Plt. SEKRETARIS KPU PROVINSI
PAPUA PEGUNUNGAN**

DANIEL JINGGA

AGUS FILMA